

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang masalah

Dalam era reformasi disetiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government gornance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah keijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan yang menuntut baragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik. (Permadi, 2013)

Seiring diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang- undang No. 2 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, reformasi aspek keuangan Negara baik dipemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan keluarkannya Undang- undang No 25 tahun 1999 yang telah direvisi Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah, berhenti sampai disitu selanjutnya reformasi pengelolaan keuangan Negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara. (Mangkarto, 2012)

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintah yang baik (*good government gornence*), Rohman dalam Modul LAN (2000) menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara / daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem akuntansi dan administrasi Negara secara menyeluruh (Negara administrasi Negara 2000). Salah satu cara yang di tempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan perangkat / peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara / daerah.

Diperkuat dengan telah dilakukannya reformasi manajemen keuangan Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkannya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa Gubernur / Bupati / Walikota / menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja kepada dewann perwakilan rakyat daerah berupa laporan keuangan (Fajar, 2010).

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi, oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011)

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan

keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang diterapkan pemerintah. (Warisno, 2009).

Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia terutama untuk pengembangan aspek intelektual dan kepribadian manusia. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal dalam organisasi merupakan suatu proses mengembangkan kemampuan kearah yang diinginkan

Tingkat pendidikan seringkali menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pengetahuan dan tingkat intelektualitas seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang memadai seseorang lebih mudah melaksanakan tugasnya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan dilatar belakangi pendidikan akuntansi atau keuangan. (Afrianty, 2011)

Pengalaman kerja didalam suatu organisasi pun menjadi salah satu indikator bahwa seseorang telah memiliki kemampuan yang lebih. Semakin lama pegawai bekerja dalam suatu bidang diorganisasi, maka semakin berpengalaman pegawai tersebut dan semakin memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai tersebut. (Jesus, 2011)

Begitupun dalam penyusunan laporan keuangan daerah, SKPD diharapkan memiliki Sumber Daya Manusia yang telah memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dibidang akuntansi atau keuangan, karena dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan pegawai yang benar-benar memahami akuntansi atau keuangan beserta aturan-aturan dalam menyusun laporan keuangan daerah. (Indisari, 2011)

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian prosedur dari mulai pengumpuln data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Permendagri No. 59 2010).

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang di berikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). (Windiastuti, 2013)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa orang pegawai yang dibidang akuntansi serta pengamatan dilingkungan DPPKAD Bone Bolango bahwa hasil laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2010 sampai tahun 2012, Mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) penilaian opini WDP pada laporan keuangan Karena penilaian aset dari BPK seharusnya nilai aset ditambahkan perencanaan dan pengawasan untuk memenuhi salah satu nilai bangunan. karena pada tahun 2010 BPK menemukan masalah kapitalisasi aset yaitu barang yang dibeli tidak dapat dirinci sesuai dengan kenyataan sebenarnya. permasalahan kapitalisasi tersebut yaitu pada tahun 2006 beberapa aset masih tercatat gelendong, tercatat 2 miliar lebih tidak dapat dirinci barangnya, kemudian aset yang ditemukan pada tahun 2008 pada saat pemekaran terdapat aset bawaan, yang penyerahannya tidak disertai dokumen yang lengkap yaitu tanah belum ada sertifikat, dan proyek pembuatan jalan yang sudah tidak diketahui dimana keberadaannya. Permasalahan yang terjadi karena pegawai kurang memperhatikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian masalah personal yaitu masalah kemalasan pegawai.

Kepala bidang Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bone Bolango menilai, minimnya kualitas Sumber Daya Manusia masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) di DPPKD Bone Bolango, kemudian sekretaris bidang akuntansi DPPKAD Bone Bolango membenarkan minimnya tenaga SDM yang memiliki latar belakang akuntansi

sehingga menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan terutama bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masalah yang terjadi dan bermaksud menuangkannya ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang disajikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Bone Bolango masih mendapat penilaian dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah saat penyajian laporan keuangan, masalah yang temukan adalah masalah kapitalisasi aset yaitu barang yang di beli tidak dapat di rinci sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

3. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang akuntansi masih menjadi faktor utama yang menjadi titik lemahnya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Bone Bolango.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan aset daerah (DPPKAD) Bone Bolango.

1.5 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

1.5.1 Manfaat teoritis

1. Manfaat dari teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan kualitas laporan keuangan. Disamping itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat praktis dari penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Bone Bolango dalam hal kualitas laporan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

1.5.2 Manfaat praktis

1. Sebagai bahan masukan maupun bahan pertimbangan pada masa yang akan datang tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Bone Bolango.
2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pimpinan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.